

BAB III

IMPLEMENTASI SIDANG KELILING BERDASARKAN ASAS

SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN AGAMA

BANTUL

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bantul

1. Sejarah Pengadilan Agama Bantul

Sebelum tahun 1960-an, satu-satunya Pengadilan Agama untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hanya terdapat di kota Yogyakarta. Lembaga Pengadilan Agama (PA) dengan wilayah yuridiksi 4 Kabupaten dan 1 kota provinsi ini mengakibatkan kesulitan bagi daerah luar kota Yogyakarta apabila akan mengajukan perkaranya. Di sisi lain mayoritas penduduk terbesar DIY adalah pemeluk agama Islam maka persoalan hukum kekeluargaannya diselesaikan oleh Lembaga Peradilan Agama yang menetapkan hukum dan peraturan sesuai dengan syari'at Islam. Untuk memenuhi kehendak hukum masyarakat DIY yang implisit di dalamnya kaum muslimin Kabupaten Bantul, maka Menteri Agama memandang perlu untuk menerbitkan sebuah peraturan yang menjadi landasan terbentuknya sebuah Lembaga PA yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Pada tanggal 1 Agustus 1961 secara resmi dibentuk Cabang Kantor PA Bantul. Penambahan kata "Cabang Kantor" karena pada waktu itu belum memenuhi persyaratan untuk didirikan PA. Cabang Kantor PA lain yang dibentuk bersamaan dengan pembentukan Cabang Kantor PA Bantul adalah :

- a. Cabang Kantor PA Wonosari, Sleman dan Wates yang merupakan Cabang dari PA Yogyakarta;
- b. Cabang Kantor PA Sukoharjo yang menjadi cabang dari PA Surakarta;
- c. Cabang Kantor PA Bawen yang merupakan cabang dari PA Surakarta; dan
- d. Cabang Kantor PA Kangean yang merupakan cabang PA Sumenep.

Dalam rangka pembentukan Cabang Kantor PA Bantul kiranya tidak dapat dilupakan jasa baik dari H. Jamhari yang pada saat itu sebagai Wakil Ketua DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagai tokoh masyarakat yang terpandang, begitu pula jasa baik dari K.H.Muhammad Shofwan yang saat itu sebagai Kepala Jawatan PA Propinsi Jawa Tengah dan DIY yang sekaligus merupakan wakil dari pihak pemerintah.

Setelah diadakan pendekatan dan pembicaraan oleh H. Jamhari dengan tokoh masyarakat dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bantul, maka selanjutnya diambil langkah pembentukan Cabang Kantor Pengadilan Agama Bantul. Atas dasar pemikiran yang sedemikian itu, kemudian keluarlah Surat Keputusan Menteri Agama nomor 61 tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 yang ditandatangani oleh K.H. Wahid Wahab tentang pembentukan Cabang Kantor PA Bantul.

Adapun wilayah yuridiksi cabang kantor PA Bantul meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Sedangkan kekuasaan absolutnya sesuai dengan

ketentuan yang terkandung dalam Staats Blaad tahun 1882 nomor 152 jo. Staats Blad nomor 116 dan 510 tahun 1937 tentang Peraturan Peradilan Agama untuk Jawa dan Madura yang meliputi penerimaan, penyelesaian perselisihan antara suami istri yang beragama Islam, perkara-perkara lain tentang perkawinan, talak, rujuk, perceraian dan menetapkan syarat jatuhnya talak yang digantungkan. Di samping itu, tuntutan mas kawin atau mahar dan tuntutan tentang keperluan hidup istri yang menjadi tanggung jawab suami termasuk wewenang cabang kantor PA Bantul, kecuali dalam perselisihan suami istri akibat perkara tersebut di atas mengenai tuntutan uang dan pemberian benda tertentu tidak termasuk wewenang cabang kantor PA Bantul.

Pada saat cabang kantor PA Bantul diresmikan, tidak disertakan dengan tenaga pengelola yang berkemampuan sepadan maupun sarana yang diperlukan. Untuk memimpin lembaga yang baru lahir tersebut dipercayakan kepada K.H. Nawawi dengan beberapa orang karyawan. Majelis Hakim sendiri terdiri dari K.H. Nawawi sebagai ketua Majelis dan K. Tondolaksito dan Abdul Hamid Asyahari sebagai Hakim anggota, dibantu pula oleh Buchori Jamal sebagai Panitera dan K.H. Maksun sebagai pendamping. Selain Hakim tetap masih ada beberapa Hakim honor yang terdiri dari K.H. Abdul Rahman, K.H. Muhyiddin, K.H. Hisyam dan K.H. Syifah. Semua Hakim dan karyawan tersebut merupakan orang-orang yang awam tentang seluk beluk pemerintahan. Mereka berasal dari berbagai latar belakang berbeda, ada yang berasal dari profesi ulama, petani, pedagang, veteran dan

lain sebagainya. Hanya K. Tondolaksito dan Buchori Jamal yang mengerti tentang pemerintahan karena merupakan pegawai KUA dan mantan Kepala Sekolah. Modal dasar para karyawan hanyalah i'tikat yang baik dan semangat yang membaja untuk mengabdikan kepada negara dan agama. Jadi tentang pengetahuan pemerintahan mereka belajar pada instansi lain.

Cabang kantor PA Bantul pertama kalinya bertempat di rumah K.H. Abdul Qodir pengasuh Pondok Pesantren Al Munawwir (Krapyak, Panggunharjo, Sewon, Bantul) selama kurang lebih tiga bulan. Fasilitas perkantoran tidak ada sama sekali dan keadaan seperti ini berlangsung cukup lama. Untuk mengatasi kesulitan tersebut ditempuh jalan mengumpulkan iuran dari setiap karyawan yang kemudian hasilnya dipergunakan membeli peralatan yang dipergunakan sehari-hari. Guna memperlancar hubungan antar instansi maka kantor pindah ke ibukota Kabupaten Bantul yang bertempat di rumah K.H. Maksu (depan Masjid Besar Bantul) selama empat bulan. Atas usaha bersama dengan pihak KUA Kabupaten Bantul akhirnya dapat menempati rumah wakaf dari Ny. Zainal terletak di Jalan Raya Bantul. Di rumah wakaf Ny. Zainal ini sidang pertama diselenggarakan, yang menerima talak atas nama Ny. Usir berlawanan dengan suaminya yang bernama Pardi, peristiwa bersejarah ini berlangsung pada tanggal 1 Oktober 1962, Majelis Hakim dalam pemeriksaan ini terdiri K.H. Nawawi sebagai Hakim Ketua, Abdul hamid dan K.H. Tondolaksito sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Daman Huri sebagai panitera.

Semenjak berkantor untuk pertama kalinya, selama tujuh bulan pertama para Hakim mengadakan studi kasus dan melihat praktek Peradilan di Pengadilan Agama Yogyakarta, yang akhirnya dengan kemampuan pribadi para Hakim tentang hukum agama, tugas sehari-hari dapat dijalankan dengan baik dalam arti semua produk putusannya sesuai dengan rasa keadilan, hal ini terbukti adanya sebuah putusan yang dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surakarta.

Selama berkantor di Jalan Raya Bantul ada Penambahan karyawan dan penyediaan peralatan perkantoran walaupun dalam jumlah yang belum memadai. Pada masa itu pula terjadi pergantian pimpinan dari K.H. Nawawi yang atas permintaan sendiri pindah ke Pengadilan Agama Magelang. Pergantian pimpinan ini terasa sekali manfaatnya, tahap demi tahap suasana kantor yang bersifat tradisi lama berubah menjadi instansi yang lebih baik dari semula.

Perkembangan yang tidak kalah penting adalah status "Cabang Kantor" Pengadilan Agama Bantul menjadi Pengadilan Agama Bantul. Perubahan ini terjadi pada saat diberlakukannya secara efektif Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Mulai saat itu perkembangan Pengadilan Agama Bantul menjadi lebih baik di bidang personalia maupun wewenangnya. Kekuasaan Pengadilan menurut Undang Undang nomor 7 tahun 1989 ialah Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Karyawan dari tahun ke tahun bertambah dengan

tenaga-tenaga berpendidikan yang sesuai kebutuhan Lembaga Peradilan. Pola pemikiran yang masih berorientasi pada pemikiran lama berangsur-angsur menjadi sikap mental seorang pegawai pemerintah yang sekaligus abdi negara dan abdi masyarakat.⁷²

2. Wilayah Yuridiksi

Pengadilan Agama Bantul adalah Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang daerah hukumnya meliputi 17 (tujuh belas) kecamatan dan 69 (enam puluh sembilan) desa di Kabupaten Bantul. Adapun desa yang ditetapkan untuk tempat dilaksanakannya Sidang Keliling adalah:

➤ Kecamatan Dlingo

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Dlingo :

- Kelurahan/Desa Dlingo
- Kelurahan/Desa Jatimulyo
- Kelurahan/Desa Mangunan
- Kelurahan/Desa Muntuk
- Kelurahan/Desa Temuwuh
- Kelurahan/Desa Terong

Wilayah Kecamatan Dlingo berada didatan tinggi. Ibukota Kecamatannya berada pada ketinggian 320 meter diatas permukaan laut.

⁷² [Http://www.pa-bantul.go.id/new/](http://www.pa-bantul.go.id/new/). Diakses pada tanggal: 13 Maret 2017, pukul 09.00 WIB.

Wilayah di Kecamatan Dlingo berupa daerah yang datar sampai berombak dan bergunung-gunung.⁷³ Adapun Kecamatan Dlingo ini berbatasan dengan, yakni:

- a. Utara : Kecamatan Piyungan dan Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul
- b. Timur : Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul.
- c. Selatan : Kecamatan Playen dan Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul.
- d. Barat : Kecamatan Imogiri, Kecamatan Pleret.

Sidang Keliling yang dilaksanakan di Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul dengan beberapa pertimbangan, yakni:

- a) Desa-desa yang ada dalam Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul adalah desa yang jauh dari Pengadilan Agama Bantul karena letaknya yang berada di ujung Kabupaten Bantul.
- b) Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul termasuk sulit untuk dijangkau transportasi.
- c) Tata letak Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul berada diampit dengan gunung-gunung sehingga susah untuk menjangkau Pengadilan Agama Bantul yang jauh.⁷⁴

⁷³ Wawancara dengan Suprapti,A.Md (Seksi Pelayanan Kecamatan Dlingo) , tanggal 25 November 2016 di Kantor Kecamatan Dlingo.

⁷⁴ Wawancara dengan Sumitro Jatiroso (Jurusa), tanggal 10 April 2017 di Pengadilan Agama Bantul.

Untuk kategori yang masuk dalam persyaratan yang dapat berperkara dengan Sidang Keliling yakni yang berdomisili atau bertempat tinggal pada enam wilayah desa yaitu Desa Dlingo, Desa Temuwuh, Desa Terong, Desa Muntuk, Desa Mangunan, Desa Jatimulyo.

3. Struktur Organisasi

Ketua	: Drs. Yusuf,S.H.,M.S.I
Wakil Ketua	: Drs. Muslim,SH.,M.S.I
Hakim	: 1. Drs. Hj. Masmuntiara, S.H.,M.H.I 2. Drs. Rizal Pasi, M.H 3. Drs. Aziddin Siregar, S.H 4. Lathifah Setyawati, S.H.,M.Hum 5. Ahsan Dawi, S.H.,S.H.I.,M.S.I 6. Yunita Faizah, S.Ag.,S.H.,M.S.I
Panitera	: Nur Ali Yaman,S.H.I
Panmud Gugatan	: Endang Winami,S.H.,M.H
Panmud Permohonan	: Suciati,S.Ag
Panmud Hukum	: Ahmad Fakhturohman, S.H.
Sekretaris	: Nohan Awalo Kitisworo,S.H
Kasubag keuangan	: Fuad Tansyauddin, S.E
Kasubag Kepegawaian	: Nurhidayanto, S.H
Kasubag Perencanaan	: Lily Yuslianty, S.E.,M.M
Panitera Pengganganti	: 1. Sugeng 2. Dra. Bibit Nur Rohyani 3. Dra. Siti Juwariyah 4. Achmad Nur hadi, S,H 5. Muhammad Khoirudin.,S.H 6. Daru solikhah, S.Ag

7. Puji Setyaningsih, S.H
8. Lasini, S.H
9. Aspiyah, S.H
- Jurusita : 1. Sugiyanto
2. Sumitro Jatiroso
3. Hj. Rini Marfuah, S.Pd
4. Rr. Siti Maryatun
5. M. Syamsul Hadi, S.H
6. Sukarna, S.H.I
7. Kiqmah Sulistyawati, A.Md
8. Irwan Setyawan
9. Bunga Hari, S.Ag
10. Sudarso

Visi Pengadilan Agama Bantul yaitu terwujudnya Pengadilan Agama Bantul yang adil dan berwibawa. Adapun Misi dari Pengadilan Agama Bantul adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapabilitas dan kredibilitas aparat peradilan sebagai penegak hukum dan keadilan yang profesional.
- b. Meningkatkan manajemen lembaga peradilan yang modern.
- c. Memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan.
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai.⁷⁵

⁷⁵*Ibid.*

B. Penerapan Pelaksanaan Persidangan Sidang Keliling Pengadilan Agama Bantul

1. Penetapan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Bantul

Untuk melaksanakan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2016, diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bantul Nomer: W12-A3/A3/1619/HK.05/V/2016 Tanggal 25 Mei 2016 Tentang Penunjukan Tim Dan Tempat Sidang Keliling Pengadilan Agama Bantul Tahun 2016.

Dalam Surat Keputusan Pengadilan Agama Bantul tersebut telah ditunjuk susunan dan personalia tim pelaksana Sidang Keliling Pengadilan Agama Bantul sebagai berikut:

1. Majelis I:

- a. Latifah Setyawati, SH.M.Hum
- b. Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I
- c. Yuniati Faizah, S.Ag, SH, M.SI

2. Majelis II:

- a. Drs. Akhbarudin, M.SI
- b. Drs. Rizal Pasi, MH
- c. Drs. M. Anwar Hamidi

3. Mediator :

- a. Dra. Hj. Masmuntara, SH, M.HI
- b. Drs. Aziddin Siregar, SH

4. Panitera:

- a. Siti Haryati, SH,M.SI
- b. Muhammad Khoiruddin,SH

5. Jurusita:

- a) Sumitro Jatiroso
- b) Sukarna, S.HI

6. Admintrasi/perlengkapan:

- a. Fuad Tasyauddin,SE

Menurut ketua Pengadilan Agama Bantul untuk jenis perkara Pengadilan Agama Bantul tidak membatasi macam-macamnya, dan untuk Pada prakteknya dalam Sidang Keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bantul adalah:

- a. Dispensasi Kawin: bagi perempuan yang belum mencapai usia 16 tahun dan bagi laki-laki yang belum berumur 19.
- b. Cerai Gugat : Gugatan cerai yang diajukan oleh istri.
- c. Cerai Talak : Gugatan cerai yang diajukan oleh suami.

Pada tahun 2016 telah tercatat 26 (dua puluh enam) perkara, yang terdiri dari:

- 1) Dispensasi Nikah : 1 perkara
- 2) Cerai Gugat : 11 perkara
- 3) Cerai Talak : 14 perkara

Anggaran Sidang Keliling, dibebankan kepada negara dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2016 sebesar Rp. 10.710.000.00, (sepuluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).⁷⁶

2. Prapersediaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Bantul

a. Tata Cara Mengajukan Surat Gugatan/Permohonan

Pada Pelaksanaannya prosudur penerimaan perkara pada Sidang Keliling menggunakan sistem seperti di pengadilan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pendaftaran perkara pada Pengadilan Agama Bantul, dilakukan di Meja I, dimana penerimaan perkara dilakukan oleh Panmud (gugatan/permohonan) yang dilaksanakan dengan cara menunjuka petugas pendaftaran.
- 2) Para pihak datang ke meja I bagian pendaftaran, dengan membawa surat gugatan/permohonan. Meja I nantinya akan merinci seberapa besar biaya perkara sesuai dengan alamat para pihak (dalam radius yang telah ditentukan).
- 3) Kasir akan mengeluarkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dengan slip setoran dibayarkan ke Bank BRI cabang Bantul. Ada slip setoran (1 untuk pihak, 1 untuk bank, 1 untuk arsip PA Bantul.
- 4) Kasir akan memberikan nomer registrasi nantinya bersamaan dengan mengeluarkan SKUM tadi.

⁷⁶ Hasil data yang diperoleh dari kesekretariatan, saat observasi di Pengadilan Agama Bantul pada hari senin, tanggal 10 April 2017.

- 5) Selanjutnya berkas diserahkan ke Meja II untuk dimasukan kebuku registrasi perkara. Berkas diserahkan ke Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk menentukan Majelis.
- 6) Panitera Pengadilan Agama Bantul akan menentukan Panitera Pengganti.
- 7) Dan Majelis Hakim akan menentukan hari sidang, yang mana selanjutnya kepanitera untuk menunjuka Jurusita pengganti.⁷⁷

Surat gugatan/permohonan pada umumnya diajukan secara tertulis oleh penggugat kepada Hakim ketua Pengadilan Agama Bantul. Dalam surat gugatan tersebut juga menjelaskan tentang identitas serta tempat kediaman pihak yang berperkara, dalam gugatan tersebut juga menjelaskan tentang kasus posisi kronologi kejadian dan alasan-alasan serta tuntutan yang dimohonkan.

Sedangkan untuk para pihak yang tidak mengerti tentang baca dan tulis gugatan/permohonan dibantu untuk pembuatanya oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul dengan memberikannya kepada Hakim yang telah ditunjuk.

b. Tata Cara Pemanggilan

Setelah ditunjuknya Jurusita/Jurusita pengganti, maka Jurusita yang ditunjuk melakukan tugasnya untuk melakukan pemanggilan kepada pihak

⁷⁷ Wawancara dengan Lasini, S.H (Panitera Pengganti), tanggal 10 April 2017 di Pengadilan Agama Bantul.

atau kedua belah pihak yang akan berperkara dengan membuat berita acara panggilan (*relaas*).

Pemanggilan ini dilakukan dengan memanggil para pihak ditempat kediaman para pihak sesuai dengan alamat yang tertulis dalam suatu gugatan/permohonan dengan jarak panggilan minimal 3 hari kerja dengan hari sidang yang telah ditetapkan apabila dapat bertemu langsung dengan pihaknya maka dimintakan tanda tangannya, setelah sampai pada alamat, ketika bertemu secara langsung dengan pihak tetapi tidak mau tandatangan maka harus ditulis dalam berita dalam relaas panggilan. Namun apabila tidak dapat bertemu secara langsung maka Jurusita akan menyerahkannya kepada kepala desa setempat untuk disampaikan kepada para pihak dan meminta untuk kepala desa untuk bertandatangan pada relaas.

3. Tahapan-tahapan Pelaksanaan Sidang Keliling

a. Upaya Perdamaian

Upaya perdamaian dilakukan oleh Majelis Hakim apabila kedua belah pihak dapat hadir dalam persidangan dan Majelis Hakim memerintahkan untuk kedua belah pihak untuk menghadap melakukan mediasi, mediator yang ditugaskan yakni Dra. Masmuntiara, SH.MH dan Drs. Aziddin Siregar, SH.

Namun apabila lawan (tergugat/termohon) tidak hadir, maka mediasi dilakukan oleh Majelis Hakim dengan cara menasehati pihak Penggugat/Pemohon dalam persidangan.⁷⁸

b. Pembacaan Surat Gugatan/Permohonan

Pembacaan surat gugatan/permohonan ini dilakukan setelah pihak lawan telah dipanggil secara patut dan sah walaupun pihak yang dipanggil tidak hadir. Persidangan yang dihadiri lengkap oleh kedua belah pihak maka Majelis Hakim tetap akan memerintahkan para pihak untuk kembali menghadap kemediator untuk mediasi, untuk tidak mudah terjadi perceraian.

c. Jawab-menjawab

Tahapan pemeriksaan jawab-menjawab ini dilakukan setelah terlaksananya pembacaan gugatan/permohonan dan pihak penggugat/pemohon telah menyatakan cukup untuk apa yang menjadi gugatan/permohonannya.

Untuk tahapan jawab-menjawab ini terdapat beberapa tahapan yaitu jawaban, replik, duplik dan apabila dalam jawaban terdapat gugatan balik (rekopensi), pihak tergugat rekopensi diberikan hak menjawab rekopensinya.

⁷⁸ Hasil observasi (tinjauan lapangan) saat pelaksanaan Sidang Keliling di Kantor Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, pada hari Kamis, tanggal 11 November 2016.

d. Pembuktian

Tahapan selanjutnya masuklah dalam pembuktian dengan menyatakan kebenaran dalil dan alasan dalam gugatan/permohonan yang dijelaskan didalamnya, pihak penguat/pemohon kemudian harus mengajukan alat-alat bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi.

Untuk bukti tertulis yang diminta oleh Majelis Hakim adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), untuk menunjukan bukti haknya mengajukan perkara di dalam wilayah hukum yang sesuai dengan wilayah Pengadilan Agama Bantul serta ditambah dengan bukti-bukti tertulis yang lain apabila ada.

Sedangkan untuk membuktikan alasan-alasan penguat dari kronologi dalam gugatan/permohonan maka Hakim meminta Penggugat/Pemohon untuk menghadapkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan dalam persingan dengan bersumpah untuk kebenarannya terlebih dahulu.

Untuk saksi dihadirkan keluarga terdekat dari penggugat/pemohon. Untuk tergugat/termohon juga memiliki hak yang sama layaknya termohon dan pemohon untuk mengajukan bukti untuk memperkuat dari dalil maupun alasan bantahannya.

e. Kesimpulan

Setelah dilakukannya tahapan-tahapan upaya damai, pembacaan gugatan, jawab-menjawab dan pembuktian maka dilanjutkan dengan tahapan kesimpulan, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan kesimpulannya menceritakan kembali duduk

perkara atas kejadian-kejadian dari keseluruhan pemeriksaan sampai dengan sikap para pihak yang tetap teguh untuk menguatkan dalili gugatannya.

f. Musyawarah Majelis Hakim

Setelah kesimpulan terjadi maka saatnya para Majelis Hakim merundingkan atau memusyawarahkan untuk putusan dengan rahasia dan karena berdifat rahasia maka sidang diskors terlebih dahulu dengan mempersilahkan para pihak untuk keluar dari ruangan dan Hakim merundingkan putusan yang tepat tanpa tururt serta dari Panitera.

g. Pembacaan Penetapan/Putusan

Setelah musyawarah selesai maka Panitera memanggil kembali para pihak yang menunggu diluar dan Hakim kembali membuka sidang dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Setelah para pihak sudah hadir diruangan, Hakim membacakan hasil musyawarah yang menjadi putusan atau ketetapan dalam putusan.

Apabila salah satu pihak tidak datang maka Hakim mmerintahkan kepada Jurusita untuk menyampaikan isi putusan dari hasil musyawarah Hakim dengan memberi tahukan bahwa dapat melakukan upaya hukum yang dapat dilakukan setelah ada putusan Pengadilan.

4. Proses Pelaksanaan Sidang Keliling Bantul

Proses persidangan pada Sidang Keliling yang dilaksanakan di kantor Kecamatan Dlingo adalah sebagai berikut:

- a. Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, para pihak dipersilahkan memasuki ruang persidangan.⁷⁹
- b. Majelis Hakim memeriksa kelengkapan berkas perkara, diantaranya;
- 1) Surat gugatan/surat Permohonan
 - 2) SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)
 - 3) Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insedentil (bila dengan kuasa)
 - 4) PMH (Penetapan Majelis Hakim)
 - 5) Penunjukan Panitera Pengganti
 - 6) Penetapan Hari Sidang
 - 7) Penunjukan Jurusita Pengganti
 - 8) Pemanggilan Para Pihak.
- c. Apabila sidang pertama, pihak lawan (tergugat/termohon) tidak hadir maka, sidang ditunda untuk memanggil pihak (tergugat/termohon) sekali lagi, serta Majelis Hakim menyampaikan untuk sidang kedua disiapkan untuk alat bukti tertulis maupun saksi-saksi.
- d. Apabila pada sidang kedua, pihak lawan (tergugat/termohon) tidak hadir, sedangkan pihak lawan (tergugat/termohon) tersebut telah dipanggil secara sah dan patut, maka ketua Majelis Hakim menanyakan sikap pihak berperkara, apakah gugatan/permohonana akan tetap dilanjutkan atau dicabut, dan apabila tetap maka Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan cara menasehati pihak penggugat/pemohon.

⁷⁹*Ibid.*

- e. Apabila perdamaian gagal, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara, yang dimulai dengan membacakan surat gugata/permohonan, serta menayakan kepada penggugat/pemohon apakah ada tambahan yang akan disampaikan dalam gugatan tersebut ataukah cukup dalam gugatan/permohonannya.
- f. Apabila dalam sidang kedua tersebut pihak berperkara telah menyiapkan alat-alat bukti, maka persidangan berlanjut kepada pembuktian untuk memeriksa alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang telah disiapkan oleh penggugat/pemohon. Setelah adanya pemeriksaan bukti-bukti serta saksi maka persidangan dilanjutkan pada tahap kesimpulan. Selanjutnya sidang ditunda untuk dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim, dan setelah musyawarah Majelis Hakim selesai. Ketua Majelis membacakan putusan dengan tanpa dihadiri pihak lawan (verstek).
- g. Pada sidang kedua apabila pihak lawan (tergugat/termohon) apabila hadir, maka sebelum memeriksa pokok perkara ketua Majelis akan berusaha untuk mendamaikan kepada kedua belah pihak dengan melalui proses mediasi, dengan menghadapkan kedua belah pihak untuk menghadap kepada mediator yang sudah ditunjuk, yakni Dra. Masmuntiara, SH.MH dan Drs. Aziddin Siregar, SH.
- h. Apabila saat pelaksanaan sidang yang ketiga, kedua belah pihak hadir dalam persidangan, ketua Majelis Hakim mebacakan hasil dari mediasi. Dan apabila proses mediasi berhasil maka pihak

Penggugat/Pemohon mencabut gugatan/permohonannya. Namun sebaliknya apabila gagal, pemeriksaan akan dimulai dengan membacakan surat gugatan/permohonan. Dan akan mulai dengan jawaban pihak lawan apabila pihak lawan telah menyiapkannya, namun apabila belum maka sidang akan ditunda.

- i. Apabila pada sidang berikutnya kedua belah pihak berperkara hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan pada tahap jawab-menjawab (*replik-duplik*), pemeriksaan alat bukti, kesimpulan, serta musyawarah Majelis Hakim, dan pembacaan putusan.
- j. Apabila pemeriksaan perkara perceraian (cerai gugat/cerai talak), keseluruhan pemeriksaan (pembacaan surat gugatan/permohonan, jawab menjawab pemeriksaan alat bukti, kesimpulan) dilakukan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, sedangkan pada saat pembacaan putusan sidang dinyatakan terbuka untuk umum.
- k. Apabila pemeriksaan cerai talak, setelah perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, kedua belah pihak yang berperkara (pemohon dan termohon) dipanggil untuk sidang pengucapan ikrar talak, terhadap perkara cerai talak yang diikrarkan tersebut ketua Majelis Hakim menjatuhkan penetapan yang menyatakan bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon putus karena perceraian.⁸⁰

l.

⁸⁰*Ibid.*

C. Sidang Keliling Pengadilan Agama Bantul Dengan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Pelaksanaan Sidang Keliling disetiap pengadilan tentunya memiliki tujuan atau suatu ukuran untuk mencapai target dari apa yang telah dikonsepkan, semakin besar target yang dicapai maka semakin besar juga efektifitasnya dalam pelaksanaan Sidang Keliling. Peneliti mempertimbangkan adanya tingkat kesesuaian dengan salah satu asas dalam Pengadilan Agama, yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ini tentunya merupakan keinginan setiap pihak yang berperkara untuk mencari keadilan. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan diatur dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 pasal 2 ayat (4) tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dimuat dalam Undang-undang Nomer 7 Tahun 1989 Pasal 57 ayat (3) tentang peradilan Agama.

Tujuan asas ini agar proses pemeriksaan di Pengadilan, tidak memakan waktu yang lama apalagi sampai dengan bertahun-tahun dan Hakim tidak mempersulit proses persidangan dengan sering mundur dalam jadwal persidangan. Jadi Hakim dituntut dalam pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ini haruslah menerapkan sikap “moderasi”. Tidak cenderung secara ekstrim melakukan pemeriksaan yang tergesa-gesa, sehingga jalanya pemeriksaan meninggalkan harkat dan derajat kemanusiaan. Tetapi jangan dilambat-lambatkan. Lakukan pemeriksaan yang seksama dan wajar, rasional, dan objektif, dengan cara

memeri kesempatan yang berimbang dan sepatutnya kepada masing-masing pihak yang berperkara.⁸¹

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sangat tepat untuk pelaksanaan Sidang Keliling dengan melihat kondisi yang berbeda kondisi di Pengadilan Agama.

1. Asas sederhana

Peneliti menanyakan tentang pemahaman asas biaya ringan dalam penerapannya di Sidang Keliling.

Wawancara dilakukan dengan Latifah Setyawati, SH, M. Hum:

“Yang dimaksud dengan asas sederhana yaitu asas yang untuk pelaksanaannya sendiri tidak menyusahkan atau berbelit-belit untuk pihak yang berperkara sehingga harus jelas dan lugas untuk efisiennya dalam menyelesaikan perkara-perkara yang dibawa ke Pengadilan.

*Penerapannya untuk didalam Sidang Keliling ini tentu kita terapkan dalam Sidang Keliling tapi juga tidak hanya diterapkan dalam Sidang Keliling karena ini berlaku untuk semua sidang di peradilan agama. Dan sederhana dalam Sidang Keliling ini juga bisa dikatakan sederhana apabila seperti saat saya di peradilan agama sebelum di pindah ke Bantul karena disana Sidang Keliling nya hanya diterapkan untuk jenis perkara yang permohonan seperti istbat nikah atau pembuatan akta anak karena dalam satu ruangan Sidang Keliling terdapat Hakim yang memutuskan dan pejabat lain seperti KUA yang mencatat akta nikah, dan pelaksanaan nya sidang cukup sekali selesai”.*⁸²

Wawancara dilakukan peneliti dengan Drs. Rizal Pasi, MH:

⁸¹ M. Yahya Harahap. 2003. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 71.

⁸² Wawancara dengan Latifah Setyawati, SH, M. Hum (Hakim Pengadilan Agama Bantul), tanggal 10 April 2017 di Pengadilan Agama Bantul.

“Yang dimaksud dengan asas sederhana itu adalah asas yang memudahkan dengan penerapan sehingga tidak dipersulit untuk penyelesaian kasus yang dibawa ke Pengadilan maupun ke Sidang Keliling.

*Untuk penerapannya asas sederhana dalam Sidang Keliling hanya bisa di praktekkan dari segi administrasi saja akan tetapi dalam putusannya belum bisa diterapkan karena untuk penyelesaian perkara tertentu membutuhkan waktu yang lama dengan harus melakukan suatu pertimnagan dengan benar untuk memutuskannya. Namun kami sebagai Hakim selalu mengupayakan seoptimal mungkin untuk diterapkan nya asas sederhana ini. Dan dalam prakteknya di Sidang Keliling ketika menangani kasus perceraian untuk menerapkan asas sedehana kami agak kesulitan karena adanya asas mempersulit dalam perceraian, sehingga dalam Sidang Keliling tentu saja asa tersebut sulit untuk di praktekkan”.*⁸³

Wawancara dilakukan peneliti dengan Ahsan Dawi, S.H.,S.H.I.,M.S.I:

“Asas sederhana yaitu tidak menyusahkan dan tidak mempersulit masyarakat yang membawa kasus-kasus mereka ke Pengadilan Agama maupun Sidang Keliling baik dalam adminstrasi maupun putusannya, karena sering kali asas ini terupakan oleh penegak hukum hingga banyak kasus-kasus menumpuk di Pengadilan dan belum terselesaikan.

*Dalam penerapannya sendiripun kami belum bisa sepenuhnya menerapkan dalam Sidang Keliling karena adanya anggaran yang terbatas yang diberikan DIPA sehingga adanya kasus-kasus yang rumit seperti perceraian menjadikannya harus berlanjut kembali di proses di Pengadilan karena tidak semudah yang diharapkan untuk memberikan putusan dalam kasus peceraian, berbeda halnya dengan kasus istbat nikah misalnya yang dapat dilakukan dengan asas sederhana ini karena proses persidangannya yang tidak membutuhkan waktu yang lama. Namun kami selalu mengusahakan asas sederhana ini untuk menyelesaikan suatu kasus.”*⁸⁴

Wawancara dilakukan peneliti dengan Prihanto salah satu masyarakat

yang mendaftarkan perkara di Sidang Keliling:

⁸³ Wawancara dengan dengan Drs.Rizal Pasi, MH (Hakim Pengadilan Agama Bantul), tanggal 10 April 2017 di Pengadilan Agama Bantul.

⁸⁴ Wawancara dengan dengan Ahsan Dawi (Hakim Pengadilan Agama Bantul), S.H.,S.H.I.,M.S.I, tanggal 10 April 2017 di Pengadilan Agama Bantul.

“Yang saya tau sederhana itu tidak ribet dan susah untuk itu yang saya tau.”

Pelaksanaan nya yang saya alami saat Sidang Keliling saya merasa tidak dipersulit oleh Hakim dari saya daftar sampai dengan ambil putusan . saat saya daftar memang sempat mengalami kebingungan dalam surat menyurat seperti matrai dan cap dari kantor pos namun itu juga diberi arahan yang baik oleh petugasnya sehingga berjalan lancar. Saat sidang juga saya ikuti saja apa yang diperintahkan Hakim seperti membawa saksi dan lain-lain. Jadi saya tidak merasa ini susah untuk dilakukan.⁸⁵

Pernyataan diatas tentang asas sederhana, menunjukan dalam Sidang Keliling selalu diupayakan pelaksanaan dengan asas sederhana tanpa menyalahi hukum acara Peradilan Agama dan masyarakat tetap terbantu dengan dilaksanakannya Sidang Keliling

2. Asas Cepat

Peneliti menanyakan tentang pemahaman asas cepat serta penerapannya dalam Sidang Keliling.

Wawancara dilakukan peneliti dengan Latifah Setyawati,SH,M.Hum:

“Asas cepat yaitu cepat untuk menangani kasus-kasus perkara yang diserahkan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama, namun tentu tidak sembarangan untuk memutuskan karena melalui pertimbangan-pertimbangan yang baik.

Penerapan asas cepat ini sebenarnya sama saja dengan penerapan asas sederhana. Dan peneparan dalam Sidang Keliling sendiri dapat dilaksanakan apabila kasus tertentu seperti isbat nikah, sama seperti sederhana tadi karena di Pengadilan Agama terdahulu saya melakukan Sidang Kelilingnya dengan hanya perkara permohonan dan bahkan

⁸⁵ Wawancara dengan Prihanto (masyarakat yang ikut serta dalam Sidang Keliling), tanggal 25 November 2016 di Kantor Kecamatan Dlingo.

*dilakukan nya dengan Hakim tunggal karena banyak perkaranya dan akhirnya harus dengan Hakim tunggal untuk mempercepatnya”.*⁸⁶

Wawancara dilakukan peneliti dengan Drs.Rizal Pasi, MH:

“Asas cepat adalah cepat untuk menyelesaikan perkara tapi juga harus cermat sehingga menciptakan keadilan seperti yang diharapkan oleh kedua belah pihak.

*Untuk prakteknya dalam Sidang Keliling asas cepat ini dapat diterapkan namun tidak semuanya bisa dipukul rata karena ada tahapan-tahapan acara yang dilakukan dengan teliti, masyarakat juga seringkali meminta agar perkaranya cepat selesai kepada Hakim namun untuk perwujudan keadilan tentunya tidak bisa dipaksakan untuk selalu cepat karena butuh kajian-kajian dan kami tidak bisa tergopoh-gopoh untuk melakukannya”.*⁸⁷

Wawancara dilakukan peneliti dengan Ahsan Dawi, S.H.,S.H.I.,M.S.I:

“Asas cepat yaitu cepat untuk menuntaskan perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan. Untuk melaksanakan asas cepat ini tidak juga dapat dilakukan dengan tergesa-gesa karena walaupun cepat tapi tetap dengan ketelitian, adalah kesalahan dalam asas cepat ini apabila perkara yang masuk di tarik-ulur dengan tidak jelas, maka Hakim tidak boleh bertele-tele.

*Dalam prakteknya diSidang Keliling asas cepat ini akan sulit diterapkan apabila perkara yang memang harus melalui proses yang panjang namun akan mudah apabila diterapkan pada kasus yang memang cepat dapat diselesaikan seperti isbat nikah”.*⁸⁸

Wawancara peneliti dengan Prihanto:

“Asas cepat yaitu cepat dalam proses sidangnya dan cepat untuk putusnya.

Untuk penerapan yang saya rasakan, saya merasakan cepat untuk sidangnya dan setelah saya selesai sidang saya bisa kembali bekerja karena tidak terlalu jauh dari rumah dengan pelaksanaan sidangnya, kalau saya ikut sidang di Pengadilan mungkin saya akan pulang sore

⁸⁶ Wawancara dengan dengan Latifah Setyawati,SH,M.Hum (Hakim Pengadilan Agama Bantul), tanggal 10 April 2017 di Pengadilan Agama Bantul.

⁸⁷ Wawancara dengan dengan Drs.Rizal Pasi, MH (Hakim Pengadilan Agama Bantul), tanggal 10 April 2017 di Pengadilan Agama Bantul.

⁸⁸ Wawancara dengan dengan Ahsan Dawi (Hakim Pengadilan Agama Bantul), S.H.,S.H.I.,M.S.I, tanggal 10 April 2017 di Pengadilan Agama Bantul.

*hari dan tidak bisa kerja, tapi untuk putusannya tidak langsung sekali saya langsung dapatkan karena masih ada proses selanjutnya lagi”.*⁸⁹

Penjelasan diatas bahwa Sidang Keliling ini merupakan suatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik dalam dana, jarak, maupun waktu. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini sudah terpenuhi, namun masih ada beberapa kendala.

3. Asas Biaya Ringan

Peneliti menanyakan tentang pemahaman asas biaya ringan dalam penerapan Sidang Keliling.

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan Latifah Setyawati,SH,M.Hum:

“Yang dimaksud dengan asas biaya ringan yaitu untuk mencari keadilan masyarakat yang membawa kasus perkara nya hendaknya tidak dipersulit dengan pembiayaan karena pihak Pengadilan sendiri telah mendapatkan anggaran dari negara, yang mana kami berharap apabila ada masyarakat yang merasa tidak mampu jangan enggan untuk datang untuk berurusan ke Pengadilan Agama.

Asas biaya ringan dalam prakteknya ketika Sidang Keliling Pengadilan berupaya untuk datang ke daerah-daerah yang jauh dari Pengadilan hingga meringankan masyarakat dari segi biaya transportasi misalnya karena apabila jauh akan menggunakan angkutan umum yang tidak sedikit juga harganya atau kendaraan pribadi yang membutuhkan banyak bahan bakar tentunya. Dan kalau pengalaman di Peradilan Agama saya sebelumnya terdapat bantuan dari Pemerintah Daerah untuk biaya pendaftaran masyarakat yang mengikuti sidang keiling dengan cara masyarakat mengumpulkan perkaranya nanti perwakilan salah satu datang ke Pengadilan dan mendaftarkan dan biaya akan turun setelah telah terdaftar. Ini yang sesuai apabila dikatakan dengan biaya ringan, sedangkan di Pengadilan Agama Bantul sendiri masih

⁸⁹ Wawancara dengan dengan Prihanto (masyarakat yang ikut serta dalam Sidang Keliling), tanggal 25 November 2016 di Kantor Kecamatan Dlingo.

*menggunakan biaya pribadi untuk pendaftaran perkara ke Pengadilan”.*⁹⁰

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan Drs.Rizal Pasi, MH:

“Asas biaya ringan yaitu keadaan yang tidak di materialistikan sehingga masyarakat yang mencari keadaan tidak enggan untuk datang berperkara ke Pengadilan dengan adanya jaminan biaya ringan.

*Dalam Sidang Keliling pihak Pengadilan berupaya untuk masyarakat agar tidak mengeluarkan biaya yang besar dengan mengadakan persidangan yang dilakukan secara langsung di desa yang telah ditetapkan yang biasanya ini adalah daerah yang jauh dari Pengadilan. Sehingga masyarakat tidak memerlukan biaya untuk transportasi dari desa masing-masing ke Pengadilan”.*⁹¹

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan Ahsan Dawi,

S.H.,S.H.I.,M.S.I:

“Yang dimaksud dengan asas biaya ringan adalah bagaimana untuk sidang itu dilakukan dengan biaya yang murah hingga tidak memberatkan pihak pencari keadilan untuk datang dan berperkara ke Pengadilan.

*Salah satu upaya dari Pengadilan untuk asas biaya ringan ini yaitu dengan melakukan Sidang Keliling untuk menekan adanya biaya yang besar dari masyarakat, khususnya masyarakat yang jauh untuk ke Pengadilan. Ini juga menjadi pemicu masyarakat tidak mau berperkara ke Pengadilan karena harus bolak-balik ke Pengadilan dan biayanya besar pula.”*⁹²

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan Prihanto:

“Kalau asas biaya ringan yang saya tau tidak berat untuk membayar biaya kasus di Pengadilan dan kami tidak merasa dibebani dengan adanya biaya yang besar.

Untuk pelaksanaan Sidang Keliling sendiri saya sangat terbantu karena tidak harus capek bolak-balik ke Pengadilan dan jaraknya pun tidak jauh

⁹⁰ Wawancara dengan dengan Latifah Setyawati (Hakim Pengadilan Agama Bantul),SH,M.Hum, tanggal 10 April 2017 di Pengadilan Agama Bantul.

⁹¹ Wawancara dengan dengan Drs.Rizal Pasi (Hakim Pengadilan Agama Bantul), MH, tanggal 10 April 2017 di Pengadilan Agama Bantul.

⁹² Wawancara dengan dengan Ahsan Dawi (Hakim Pengadilan Agama Bantul), S.H.,S.H.I.,M.S.I, tanggal 10 April 2017 di Pengadilan Agama Bantul.

*dari rumah saya jadi saya tidak perlu banyak uang untuk datang ke Pengadilan, karena mayoritas daerah kami ini adalah petani jadi sangat sulit untuk biaya yang besar, tapi sidang yang dilakukan di desa ini sangat membantu kami”.*⁹³

Pelaksanaan Sidang Keliling di Kecamatan Dlingo tidak sepenuhnya diberi anggaran oleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) karena hanya bagian operasional serta transport untuk para petugas yang turut ikut serta bertanggung jawab dalam Sidang Keliling. Namun untuk biaya panggilan relas untuk para pihak tetaplah dibebankan kepada para pihak yang biasanya disebut dengan biaya panjar, salah satu Hakim menjawab pertanyaan peneliti tentang biaya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa masyarakat tetap mengeluarkan biaya panjar untuk pemanggilan para pihak yang dilakukan oleh Jurusita. Menurut Peraturan Mahkamah Agung No 10 Tahun 2014 pasal 20 ayat (1) :

Biaya penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan dibebankan kepada anggaran satuan Pengadilan dan terdiri dari :

- a. Biaya penyelenggaraan persidangan jika diperlukan*
- b. Biaya perlengkapan sidang jika diperlukan; dan*
- c. Biaya perjalanan dinas Hakim, panitera dan petugas lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2).*

⁹³ Wawancara dengan Prihanto (masyarakat yang ikut serta dalam Sidang Keliling), tanggal 25 November 2016 di Kantor Kecamatan Dlingo.

Adanya ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut maka menegaskan bahwa yang diberi biaya oleh DIPA hanyalah untuk pelaksanaan Sidang Kelilingnya bukan untuk biaya perkaranya.

Masyarakat yang tidak mampu untuk membayar perkara Sidang Keliling maka dapat mengajukan permohonan pelaksanaan sidang dengan prodeo.

Untuk perkara secara prodeo ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2014 Pasal 7, dengan mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM), surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti kartu keluarga miskin (KKM), kartu Jaminan kesehatan masyarakat (JAMKESMAS), kartu beras miskin (RASKIN), kartu program keluarga harapan (PKH), atau dokumen lain yang berkaitan dengan penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Menurut Lily Yuslianty, S.E., M.M selaku pemegang laporan keuangan, anggaran DIPAdipergunakan dengan penjelasan sebagai berikut:

“Anggaran dana yang diberikan oleh DIPA hanya diatur untuk biaya perjalanan, jadi untuk biaya gedung perlengkapan sidang yang diperlukan dan tidak dianggarkan oleh DIPA. Kami sudah merancang untuk anggaran dana lain-lain seperti biaya perjalanan, jadi untuk biaya gedung perlengkapan sidang yang diperlukan namun yang diberikan oleh DIPA hanya operasional pelaksanaannya saja.

Karena dana yang diberikan oleh DIPA tidak sesuai dengan apa yang rancang oleh Pengadilan Agama Bantul maka kami banyak mengalami

*kekurangan dana hingga harus memakai anggaran kantor untuk menutupi kekurangannya”.*⁹⁴

Pernyataan yang disampaikan oleh Lily Yuslianty, S.E.,M.M tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2014 pasal 20 ayat (1), hingga ini menjadi tantangan dari Sidang Keliling.

Untuk biaya ringan akan dirasakan oleh masyarakat dengan diringankannya meraka untuk tidak mengabiskan banyak biaya perjalanan bolak-balik ke Pengadilan Agama namun disisi lain ini menjadi tidak ringan bagi pihak Pengadilan sendiri karena yang dibutuhkan dengan yang dana tidak berjalan dengan sesuai.

D. Faktor Hambatan dan Penyelesaian Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Bantul

Pelaksanaan dalam hukum acara yang digunakan dalam persidangan di Pengadilan Agama pada umumnya tidaklah berbeda dengan pelaksanaan hukum acara dalam pelaksanaan Sidang Keliling terlihat dengan adanya pasal 19 angka 1, Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan menyebutkan petugas penyelenggara Sidang Keliling terdiri dari Hakim dan Panitera Pengganti, yang mana ini sejalan dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Keakiman, pasal 17 ayat (1), yang berbunyi:

⁹⁴ Wawancara dengan Lily Yuslianty (Kasubag Perencanaan Informasi, Teknologi, dan Pelaporan), S.E.,M.M, tanggal 10 April 2017 di Pengadilan Agama Bantul.

“Semua Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.”

Diperkuat dengan pasal 19 angka 2, Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yang berbunyi:

(2) Sidang di Luar gedung Pengadilan dapat diikuti oleh Hakim Mediator, Jurusita, satuan pengamanan, dan pejabat serta staf Pengadilan lainnya sesuai kebutuhan.

Hakim mediator dan staff Pengadilan lain yang dibutuhkan dalam Sidang Keliling semakin memperkuat alasan bahwa tidak ada perbedaan antara hukum acara yang digunakan dalam proses persidangan di Pengadilan ataupun dalam proses Sidang Keliling.

Yang membedakan pelaksanaan Sidang Keliling ini dengan sidang di Pengadilan Agama, terdapat pada pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, dalam pelaksanaan bentuk Sidang Keliling ini dilakukan di kantor pemerintahan setempat seperti kantor kecamatan, kantor KUA Kecamatan, kantor desa, atau gedung lainnya.

Sidang Keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bantul mendapat respon yang baik dari pejabat setempat serta masyarakat dijelaskan dalam wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Bantul, yakni:

“Untuk pelaksanaan Sidang Keliling yang selalu dilakukan oleh Pengadilan Agama ini akan sangat membantu masyarakat khususnya

*masyarakat yang jauh dari Pengadilan Agama Bantul, kalau kerjasama atau koordinasi dengan pejabat setempat kami pendapat respon yang sangat baik dari mereka serta masyarakat dan mereka malah meminta lebih sering untuk melaksanakan Sidang Keliling ini karena sangat membantu masyarakat, namun kami tidak bisa selalu melakukannya sidang keliling ini paling tidak kami bisa melakukannya 1 (satu) kali agenda dalam setahun Sidang Keliling yang mana 1 (satu) kali agenda itu bisa beberapa kali turun ketempat. Kalau mengikuti permintaan masyarakat untuk selalu diadakan Sidang Keliling kami tidak bisa karena terhambat dana yang tidak memadai dan perkara yang juga banyak di Pengadilan Agama Bantul”.*⁹⁵

Adanya dukungan dari masyarakat juga dijelaskan oleh salah satu Jurusita

Sumitro Jatiroso yang ditunjuk dalam Sidang Keliling, yakni:

*“Saat saya mengantar bagian relas kerumah-rumah masyarakat di desa Dlingo dan saya juga memberitahukan mereka bahwa sidang nantinya tidak dilakukan di pengadilan agama Bantul melainkan akan dilakukan di kantor Kecamatan Dlingo pada tangga sesuai dengan yang ada didalam relaas, dan respon masyarakat positif dengan mereka berterimakasih karena tidak perlu jauh untuk mendapatkan keadilan”.*⁹⁶

Respon-repon baik yang diberikan oleh masyarakat dan pejabat setempat untuk adanya program Sidang Keliling masih terdapat beberapa hambatan dari Pengadilan Agama, Kecamatan Dlingo dan masyarakat.

1. Hambatan-Hambatan Sidang Keliling

Pelaksanaan Sidang Keliling terdapat beberapa hambatan dari lembaga Pengadilan Agama Bantul, pejabat setempat yang bertugas serta masyarakat.

Adapun hambatan-hambatan itu yakni:

a. Pengadilan Agama Bantul

Sidang Keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bantul adanya beberapa hambatan-hambatan yakni:

⁹⁵ Wawancara dengan Drs. Yusuf, S.H., M.S.I (Ketua Pengadilan Agama Bantul), tanggal 10 April 2017 di Pengadilan Agama Bantul.

⁹⁶ Wawancara dengan Sumitro Jatiroso (Jurusita), tanggal 10 April 2017 di Pengadilan Agama Bantul.

- 1) Pendaftaran perkara masyarakat masih mengahruskan masyarakat daftar langsung ke Pengadilan Agama Bantul dan tidak dapat dilakukan secara kolektif.
- 2) Masyarakat tidak dapat mendaftarkan perkaranya ditempat pelaksanaan Sidang Keliling, karena Pengadilan Agama tidak dapat membawa staf lebih karena adanya terbatasnya dana dari DIPA.⁹⁷
- 3) Dana yang terbatas menjadi salah satu hambatan Pengadilan Agama, karena ketidak sesuaian antara rancangan dengan anggaran yang diberikan DIPA.
- 4) Adanya pembayaran biaya panjar dari masyarakat secara pribadi.

b. Kecamatan Dlingo

Kecamatan Dlingo memiliki beberapa hambatan-hambatan seperti:

- a) Penentuan tempat pelaksanaan Sidang Keliling, karena banyaknya desa yang ada di Kecamatan Dlingo.
- b) Terbatasnya dana dari Kecamatan Dlingo untuk ikut mendanai pelaksanaan sidang keliling.
- c) Pengawasan yang belum optimal, salah satunya pengawasan dalam bentuk administrasi pendaftaran perkara.⁹⁸

⁹⁷ Wawancara dengan Lasini, S.H (Panitera Pengganti) , tanggal 10 April 2017 di Pengadilan Agama Bantul.

⁹⁸ Wawancara dengan Suprpti, A.Md (Seksi Pelayanan Kecamatan Dlingo) , tanggal 25 November 2016 di Kantor Kecamatan Dlingo.

c. Masyarakat

Masyarakat mendapatkan hambatan-hambatan sebagai berikut:

- a) Mendaftarkan perkara dengan datang langsung ke Pengadilan Agama hingga membutuhkan waktu dan biaya.
- a) Pendaftaran yang tidak bisa secara kolektif.
- b) Kurangnya pengetahuan mengenai persyaratan pendaftaran perkara di Pengadilan Agama.⁹⁹

1. Alternatif Atau Solusi

Beberapa hambatan yang dijelaskan diatas, beberapa masih belum dapat ditemukan solusi oleh Pengadilan Agama, Kecamatan Dlingo serta Masyarakat namun beberapa juga dapat diselesaikan, berikut penjelasannya:

a. Pengadilan Agama Bantul

Adapun solusi-solusi yang dijelaskan oleh Pengadilan Agama Bantul untuk mengurangi hambatan yakni:

- a) Pengadilan Agama Bantul belum dapat mengatasi pendaftaran yang mengharuskan datang ke Pengadilan dan secara kolektif, sebab untuk mengurangi kesalahan dalam penerimaan perkara.
- b) Adanya anggaran yang lebih untuk Sidang Keliling kami dapat mengikutsertakan staff lebih sehingga masyarakat dapat mendaftarkan secara langsung apabila tidak dapat ke Pengadilan Agama

⁹⁹ Wawancara dengan Prihanto (masyarakat yang ikut serta dalam Sidang Keliling), tanggal 25 November 2016 di Kantor Kecamatan Dlingo.

- c) Penggunaan uang dari Pengadilan Agama untuk menutupi kekurangan anggaran yang diberikan DIPA.
- d) Pendaftaran Perkara secara Prodeo untuk masyarakat yang tidak mampu membayar panjar.

b. Kecamatan Dlingo

Adapun solusi-solusi yang dipaparkan oleh Pengadilan Agama Bantul untuk mengurangi hambatan yakni:

- a) Pelaksanaan Sidang Keliling dipusatkan di kantor Kecamatan Dlingo.
- b) Belum ada solusi untuk anggaran yang terbatas dari Kecamatan Dlingo.
- c) Penyuluhan dan persiapan lebih sebelum pelaksanaan Sidang Keliling dilaksanakan.¹⁰⁰

c. Masyarakat

Solusi yang belum dapat diselesaikan masyarakat menjadi hambatan masyarakat, namun beberapa dapat diatasi seperti:

- a) Belum ada solusi untuk pendaftaran ke Pengadilan dari masyarakat sehingga masyarakat hanya diam.
- b) Belum ada solusi untuk pendaftaran kolektif ke Pengadilan.
- c) Mencari informasi lebih dan mengikuti penyuluhan dari Kecamatan.¹⁰¹

¹⁰⁰ Wawancara dengan Suprapti,A.Md (Seksi Pelayanan Kecamatan Dlingo), tanggal 25 November 2016 di Kantor Kecamatan Dlingo.

¹⁰¹ Wawancara dengan Prihanto (masyarakat yang ikut serta dalam Sidang Keliling), tanggal 25 November 2016 di Kantor Kecamatan Dlingo.

E. Analisis Implementasi Sidang Keliling Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi Kasus Pengadilan Agama Bantul)

Pelaksanaan Sidang Keliling pada Pengadilan Agama Bantul sesuai dengan Surat Keputusan Pengadilan Agama Nomor: W12-A3/A3/1619/HK.05/V/2006 Tanggal 25 Mei 2016 Tentang Penunjukan Tim dan Tempat Sidang Keliling Pengadilan Agama Bantul Tahun 2016 dengan ketetapan tempat Sidang Keliling di Kantor kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul.

Sidang Keliling Pengadilan Agama Bantul dilaksanakan seminggu sekali yakni tiap hari jum'at di Kantor Kecamatan Dlingo dengan jarak kurang lebih 60 kilometer dari Kantor Pengadilan Agama Bantul dengan pertimbangan Kecamatan Dlingo merupakan salah satu daerah yang masuk dalam kekuasaan relatif Pengadilan Agama dengan wilayah ujung perbatasan Kabupaten Bantul. Kecamatan ini dipandang memiliki jarak tempuh yang cukup jauh dari gedung Pengadilan Agama sehingga untuk mensukseskan program BADILAG yaitu *justice for all* maka digelar Sidang Keliling di Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan Sidang Keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bantul pada dasarnya sama dengan yang dilaksanakan pada sidang di Pengadilan Agama Bantul, karena tidak ada peraturan yang membahas secara teknis tentang tata cara pelaksanaan Sidang Keliling secara rinci. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan hanya menjelaskan secara luas

tentang layanan-layanan hukum untuk masyarakat yang salah satunya adalah sidang keliling.

1. Penerapan Pelaksanaan Persidangan Sidang Keliling Pengadilan Agama Bantul

a. Penetapan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Bantul

Ketua Pengadilan Agama menerbitkan Surat Keputusan Pengadilan Agama Nomor: W12-A3/A3/1619/HK.05/V/2006 Tanggal 25 Mei 2016 Tentang Penunjukan Tim dan Tempat Sidang Keliling Pengadilan Agama Bantul Tahun 2016 untuk pelaksanaan Sidang Keliling, sebelum penetapan Tim Ketua Pengadilan Agama Bantul melakukan koordinasi terlebih dahulu antara Pengadilan Agama dengan Pemerintah daerah atau instansi lain dalam hal ini yaitu Kecamatan Dlingo. Ini sesuai dengan pasal 15 ayat 2 yang berisikan:

“Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antar Pengadilan dengan Pemerintahan Daerah atau Instansi lain.”

Dipasal 19 (ayat 1 dan 2) Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2014 dikatakan bahwa untuk petugas penyelenggara Sidang Keliling Pengadilan terdiri dari Hakim, Panitera Pengganti, Hakim Mediator, Jurusita, Satuan Pengamanan dan Pejabat serta staf Pengadilan lainnya sesuai kebutuhan. Melihat isi dari ketetapan yang telah di sebutkan dalam pembahasan sebelumnya Ketua Pengadilan Agama Bantul menetapkan dua Majelis Hakim, dua Mediator, dua Penitera, dua Jurusita,

dan satu Administrasi/Perlengkapan, yang mana sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2014 dalam pasal 19 (ayat 1 dan 2) adalah dua Majelis Hakim, dua Mediator, dua Penitera, dua Jurusuta, dan satu Administrasi/Perlengkapan bagi Pengadilan Agama Bantul karena apabila harus menjadikan hanya satu majelis dan satu jajaran staf akan memperlama pelaksanaan Sidang Keliling dan akan memakan biaya yang banyak maka Pengadilan Agama Bantul menetapkan untuk dua majelis yang dilakukan secara bersamaan.

Tempat pelaksanaan untuk Sidang Keliling ditetapkan di Kecamatan Dlingo dengan wilayah/Kelurahan:

- 1) Desa Dlingo
- 2) Desa Temuwuh
- 3) Desa Terong
- 4) Desa Muntuk
- 5) Desa Mangunan
- 6) Desa Jatimulyo

Dengan pertimbangan dilaksanakannya Sidang Keliling di Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, yakni:

- a) Desa-desa yang ada dalam Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul adalah desa yang jauh dari Pengadilan Agama Bantul karena letaknya yang berada di ujung Kabupaten Bantul.
- b) Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul termasuk sulit untuk dijangkau transportasi.

c) Tata letak Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul berada diampit dengan gunung-gunung sehingga susah untuk menjangkau Pengadilan Agama Bantul yang jauh.¹⁰²

Melihat kondisi tempat terselenggaranya Sidang Keliling ini masuk dalam kriteria dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa layanan Sidang Keliling untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis.¹⁰³

Namun melihat kondisi masyarakatnya walaupun Kecamatan Dlingo jauh dari transportasi umum namun rata-rata masyarakatnya memiliki kendaraan pribadi dan melihat jalan utama, daerah yang bergunung-gunung namun jalan bagus untuk dilewati.

2. *Prapersidangan Sidang Keliling Pengadilan Agama Bantul*

a. *Pendaftaran Perkara*

Untuk pendaftaran perkara dalam Sidang Keliling sama dengan pendaftaran perkara pada sidang biasa di Pengadilan Agama Bantul. Mengenai prosedurnya sesuai dengan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

Awal proses beracara di Pengadilan Agama dengan mengajukan surat gugatan/permohonan dengan tertulis, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul dengan menguraikan identitas dan tempat kediaman/tempat

¹⁰² Wawancara dengan Sumitro Jatiroso (Jurisita), tanggal 10 April 2017 di Pengadilan Agama Bantul.

¹⁰³ Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2014.

tinggal pihak yang berperkara. Mengenai identitas dan tempat tinggal, berkenaan dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bantul, yang mana disebutkan dalam bab III mengenai daerah kekuasaan relatif dari Pengadilan Agama Bantul terdiri dari 17 (tujuh belas) Kecamatan.

Surat gugatan/permohonan yang diserahkan ke meja dua juga harus diuraikan dengan adanya kronologis kejadian dan alasan pengajuan perkara atau disebut dengan *posita* serta tuntutan yang dimohonkan atau disebut *petitum*.

Surat gugatan/permohonan yang diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh penggugat dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, sedangkan bagi Penggugat/Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis menurut ketentuan Pasal 120 HIR dapat mengajukan gugatan/permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Agama. Terhadap orang-orang yang tidak mengerti baca tulis, surat gugatan/permohonan dibantu pembuatannya oleh ketua Pengadilan Agama Bantul dengan mendelegasikan kepada Hakim yang ditunjuk. Dengan adanya bantuan untuk pengugat/pemohon yang buta huruf ini maka akan memenuhi asas aktif memberi bantuan yakni sesuai dengan pasal 119 HIR. Namun dengan adanya posbakum di Pengadilan Agama Bantul juga ikut serta membantu masyarakat yang buta huruf ataupun tidak bisa membuat gugatan atau permohonan.

Pencantuman identitas dalam surat gugatan/permohonan dalam perkara perceraian serta alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian terbut sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, yakni :

“Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 di atas memuat:

- a. Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan termohon, yaitu istri.*
- b. Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.”*

Peneliti melihat beberapa berkar Berita Acara Persidangan (BAP), terdapat beberapa surat gugatan/permohonan yang tidak dilandasi dengan dasar hukumnya, dalam surat gugatan/permohonan hanya menceritakan kronologis kejadian yang mana menurut penulis lebih baik apabila dalam kronologisnya didasarkan juga dengan dasar hukum untuk mencegah adanya gugatan yang tidak jelas.

Dalam buku karangan Abdul Manan yang berjudul *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* menyatakan bahwa gugatan yang tidak ada dasar hukumnya sudah pasti akan ditolak oleh Hakim sidang Pengadilan karena dasar hukum inilah yang menjadi dasar

putusan yang diambilnya.¹⁰⁴ Namun pada prakteknya gugatan tersebut tetap diterima dan diperiksa pada Sidang Keliling.

Menurut Ketua Pengadilan Agama apabila tidak diterimanya gugatan/permohonan yang dikarenakan tidak ada dasar hukum nya maka akan banyak gugatan yang tidak dapat diterima karena masyarakat tidak begitu paham dengan dasar-dasar hukum untuk menguatkan pernyataan mereka, dan yang surat gugatan/permohonannya menggunakan dasar hukum biasanya menggunakan kuasa hukum atau pengacara sedangkan masyarakat khususnya masyarakat yang ikut serta dalam Sidang Keliling ini berperkara dengan secara personal tanpa menggunakan kuasa hukum.¹⁰⁵

b. Tata Cara Pemanggilan

Pemanggilan dilakukan oleh Jurusita pengganti dengan perintah Ketua Majelis Hakim. Dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bantul Nomer: W12-A3/A3/1619/HK.05/V/2016 Tanggal 25 Mei 2016 Tentang Penunjukan Tim Dan Tempat Sidang Keliling Pengadilan Agama Bantul Tahun 2016 ditunjuknya Sukarna, S.HI dan Sumitro Jatiroso sebagai Jurusita yang melakukan pemanggilan para pihak, pemanggilan ini dilakukan kepada para pihak dengan secara resmi atau patut.¹⁰⁶ Diterimanya oleh penggugat maupun tergugat yakni paling lambat 3 (tiga)

¹⁰⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, cet. I, 2000, hlm. 11.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Drs. Yusuf, S.H., M.S.I (Ketua Pengadilan Agama Bantul), tanggal 10 April 2017 di Pengadilan Agama Bantul.

¹⁰⁶ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Jakarta, 2010, hlm. 27.

hari sebelum sebelum sidang dilaksanakan, yang mana ini sesuai dengan Pasal 26 ayat (4) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selanjutnya Jurusita pengganti tersebut melaksanakan pemanggilan kepada kedua belah pihak berperkara dengan membuat berita acara panggilan (*relaas*).

Jurusita yang ditugaskan untuk memanggil para pihak, memanggil para pihak ditempat kediaman sesuai dengan yang dicantumkan dalam gugatan/permohonan dan apabila bertemu dengan Penggugat/Pemohon maka langsung dimintakan tanda tangannya. Apabila tidak bertemu dengan pihak penggugat/pemohon *relaas* akan diserahkan kepada kepala desa setempat yang nantinya kepala desa akan menyampaikan kepada para pihak dan sebagai bukti dikirimnya *relaas* maka kepala desa akan menandatangani *relaas* tersebut.

Begitupula dengan pemanggilan kepada Tergugat/Termohon dilakukan hal yang sama namun adanya lampiran surat gugatan/permohonan sebagai tambahan. Pasal 26 ayat (5) PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "*panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan*" dalam Pasal 120 HIR mengatakan bahwa penggugat yang buta huruf dapat menyampaikan isi gugatannya secara lisan namun untuk tergugat tidak ada ketentuan boleh menjawab dengan lisan, malah menurut ayat (2) Pasal 121, kalau mau ia boleh menjawab gugatan tetapi dengan surat.

2. Tahapan-tahapan Pelaksanaan Sidang Keliling

a. Upaya Perdamaian

Upaya perdamaian dilakukan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Upaya mediasi akan dilakukan Hakim apabila kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan melalui proses mediasi, dengan memerintahkan kedua belah pihak berperkara menghadap mediator yang ditunjuk yaitu Dra.Masmuntiar, SH.M.H.I dan Drs. Aziddin Siregar, SH.

Upaya mediasi oleh mediator akan memberikan nasehat kepada para pihak agar dapat melakukan kesepakatan damai. Saat pihak tergugat tidak datang maka penggugat/pemohon akan dinasehati oleh majelis Hakim dalam persidangan.

Upaya perdamaian dilakukan pada setiap persidangan seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 82 ayat (4) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009. Sebagaimana juga dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1), yaitu:

“(1) Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/ Kuasa hukum wajib mengikuti prosudur penyelesaian sengketa melalui mediasi.”

Dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator yang bersangkutan.¹⁰⁷

Menurut peneliti perlu adanya penekanan lebih serta adanya prioritas utama dalam tahapan mediasi ini karena ini adalah awal untuk tercapainya perdamaian dikedua belah pihak, sebab dengan usaha perdamaian yang berhasil tidak akan ada pihak yang merasa kalah ataupun menang dan akan terwujudnya kerukunan dan kekeluargaan.

b. Pembacaan Surat Gugatan/Permohonan

Pembacaan surat gugatan/permohonan akan dilaksanakan setelah pihak lawan telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak hadir. Apabila saat persidangan pertama pihak tergugat/termohon tidak hadir maka akan dilakukan penundaan sidang dan memanggil kembali pihak tergugat/termohon yang sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 127 HIR untuk pemanggilan kedua kalinya.

Pada pembahasan di bab II sebelumnya, sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak maka pembacaan surat gugatan/permohonan dapat dilakukan namun tahapan ini dilakukan setelah adanya mediasi dengan pihak mediator untuk adanya upaya perdamaian, apabila upaya mediasi tidak berhasil maka akan dilanjutkan pada tahapan sidang selanjutnya, dalam proses persidangan Hakim selalu memberikan nasehat dan bertanya apakah mau damai atau lanjutkan persidangannya, jadi upaya damai tidak

¹⁰⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2016 Tentang Prosudur Mediasi di Pengadilan.

berhenti saat mediasi gagal. Tahapan ini pun menjadi landasan yang digunakan oleh Pengadilan Agama Bantul untuk proses Sidang Keliling di Kecamatan Dlingo maupun di gedung Pengadilan Agama Bantul.

c. Jawab-menjawab

Tahapan pemeriksaan jawab-menjawab ini dilakukan setelah adanya pembacaan surat gugatan/permohonan dan ada pernyataan cukup tidak ada tambahan lagi dari Penggugat/Pemohon.

Setelah adanya pembacaan surat gugatan maka tergugat akan diperintahkan untuk menjawab dan sebelumnya Jurusita telah memberikan salinan surat gugatan dan menjelaskan bahwa tergugat dapat menjawab isi dari surat gugatan tersebut.

Namun tidak ada ketentuan yang menjelaskan bahwa tergugat yang buta huruf dapat menjawab dengan secara lisan seperti yang ada didalam Pasal 121 ayat (2) HIR.

“Ketika memanggil tergugat, maka beserta itu diserahkan juga sehelai salinan surat gugat dengan memberitahukan bahwa ia, kalau mau, dapat menjawab surat gugat itu dengan surat.”

Berbeda halnya dengan isi dari Pasal 120 yang membolehkan penggugat yang buta huruf untuk dapat mengajukan gugatannya secara lisan.

Namun untuk era yang masyarakatnya sekarang berbeda dengan masyarakat jaman dulu, masyarakat sekarang sudah menempuh pendidikan yang dapat untuk membaca dan menulis namun tidak menyampingkan

untuk adanya bantuan secara lisan untuk tetap masyarakat. Peneliti melihat masyarakat bukan tidak bisa membaca atau menulis untuk membuat suatu surat gugatan/permohonan namun mereka tidak paham apa yang harus mereka isi dapan buat didalam surat gugatan/permohonan tersebut hingga terjadilah adanya jawaban secara lisan, namun walaupun secara lisan Hakim para prakteknya tetap meminta dalam bentuk tertulis dengan diberikan arahan yang dimuat karena nantinya jawaban yang dimasukan kedalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Jawab-menjawab meliputi jawaban, replik, duplik dan apabila dalam jawabannya terdapat gugatan balik (*rekonpensi*), pihak tergugat rekonpensi diberikan hak jawab rekonpensinya.

d. Pembuktian

Pembuktian untuk penguat kebenaran atas kronologi atau yang menjadi alasan dalam surat gugatan/permohonan, pihak Penggugat/Pemohon harus mengajukan alat-alat bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi. Begitu pula dengan Tergugat/Termohon memiliki hak yang sama.

Dalam prakteknya di Pengadilan Agama Bantul, bukti tertulis berupa keterangan domisili dari kepala desa setempat untuk membuktikan tentang haknya dalam mengajukan perkara di daerah Pengadilan Agama Bantul.

Pembuktian yang berkaitan dengan alasan gugatan/permohonan menghadapkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan dalam

persidangan yang mana sebelumnya telah diminta untuk bersumpah/janji untuk memberikan keterangan sebenar-benarnya.

Pasal 145 HIR menyebutkan bahwa pihak keluarga merupakan saksi yang tidak dapat didengar atau diterima keterangan dan kesaksiannya. Namun di Pengadilan Agama Bantul yang menjadi saksi-saksi adalah pihak keluarga baik keluarga Penggugat/Pemohon ataupun keluarga Tergugat/Termohon terhadap perkara perceraian (cerai gugat/cerai talak), ini karena untuk pemeriksaan bukti saksi pada perkara perceraian berbeda dengan pemeriksaan bukti saksi pada perkara biasa. Pengadilan Agama Bantul berlandaskan pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 76 Pasal (1) sebagai berikut :

“1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.”

Menurut hasil wawancara yang dijelaskan oleh salah satu Hakim, saksi diambil dari salah satu anggota keluarga karena Hakim ingin mengetahui apakah sebelumnya anggota keluarga sudah mengusahakan untuk para pihak untuk tetap berdamai dan anggota keluarga karena dekat dengan para pihak maka akan mengetahui keseharian dan kronologis kejadian secara dekat dan langsung.

Kesaksian yang diambil dari anggota keluarga ditegaskan firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا قُلَىٰ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (4: 35).”

Ayat diatas menjelaskan keluarga sebagai saksi diharapkan turut serta membantu Hakim untuk memberikan arahan untuk para pihak berdamai. Menurut peneliti ada baiknya saat para pihak bersengketa saat anggota keluarga didatangkan sebagai saksi ada upaya perdamaian yang kembali dilakukan Majelis Hakim dengan bantuan keluarga, jadi tidak hanya dipanggil sebagai saksi saja dalam persidangan.

e. Kesimpulan

Tahap kesimpulan seperti dijelaskan pada pembahasan sebelumnya kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan dalam persidangan. Dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis yang menceritakan kejadian-kejadian dari keseluruhan sampai dengan kesimpulan kedua belah pihak apakah tetap mau teguh untuk berperkara mempertahankan pendapat, alasan dan tuntutan.

Menurut Roihan A. Rasyiddalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Peradilan Agama* menyatakan, karena konklusi (kesimpulan) ini sifatnya untuk membantu majelis, pada umumnya konklusi tidak diperlukan bagi perkara-perkara yang simpel, sehingga Hakim dapat meniadakannya.¹⁰⁸

f. Musyawarah Majelis Hakim

Musyawarah majelis Hakim dilakukan dengan cara sidang dinyatakan *dischors* dan majelis Hakim mengadakan musyawarah dalam sidang khusus tertutup untuk umum, yang mana ini seperti dalam Pasal 161 HIR dinyatakan bahwa apabila pemeriksaan perkara dalam sidang pertama dan sidang-sidang selanjutnya telah selesai dilakukan, maka semua pihak, saksi-saksi dan para penonton disilahkan untuk keluar dari ruang sidang Pengadilan, sehingga Hakim mendapat kesempatan yang untuk mempelajari hasil pemeriksaannya dan mengambil keputusan.¹⁰⁹

Walaupun Panitera yang merupakan salah satu bagian dari persidangan namun musyawarah majelis Hakim dilakukan dengan rahasia yang mana apa yang dimusyawarahkan oleh majelis Hakim tanpa dicampuri dengan Panitera sampai dengan ada pernyataan sidang terbuka untuk umum dari majelis Hakim. Namun, mengingat bahwa fungsi panitera/Panitera Pengganti adalah membantu majelis Hakim dengan menghadiri sidang dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, maka kehadiran Panitera/Panitera Pengganti dalam musyawarah majelis

¹⁰⁸ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers), 1991, hlm. 132.

¹⁰⁹ Penjelasan HIR Pasal 161.

Hakim tersebut itu dapat dibenarkan jika ketua majelis Hakim memandang kehadiran panitera sidang itu diperlukan.¹¹⁰

g. Pembacaan Penetapan/Putusan

Pembacaan penetapan/putusan harus dilakukan dengan dinyatakan dengan sidang dibuka dan terbuka untuk umum oleh ketua majelis Hakim, kedua belah pihak dipanggil untuk kembali masuk kedalam ruang sidang, kemudian ketua majelis akan membacakan putusannya dari hasil musyawarah majelis Hakim. Pernyataan terbuka untuk umum yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bantul ini seperti yang ada dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman:

“(2) Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.”

3. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Sidang Keliling di Pengadilan Agama Bantul

Undang-undang Nomer 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan yang dimaksudkan agar proses pemeriksaan di Pengadilan tidak memakan waktu yang lama dan Hakim tidak mempersulit proses persidangan. Adanya Sidang Keliling ini diharapkan menjadi salah satu layanan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Agama Bantul untuk memudahkan masyarakat untuk tidak jauh datang ke Pengadilan Agama Bantul.

¹¹⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000, hlm. 162.

a. Asas Sederhana

Asas sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit-belit, dan cukup *one stop service* (penyelesaian sengketa cukup diselesaikan melalui satu lembaga peradilan).¹¹¹

Namun menurut hasil wawancara dengan beberapa Hakim untuk Sidang Keliling di Pengadilan Agama Bantul bahwa asas sederhana tidak dapat dilakukan secara optimal pada beberapa kasus-kasus tertentu seperti contohnya Kasus Perceraian karena membutuhkan waktu yang lama untuk pemeriksaan.

Tanggapan masyarakat yang ikut serta dalam Sidang Keliling untuk berperkara mengatakan bahwa beliau sangat terbantu dengan adanya Sidang Keliling karena tidak perlu jauh untuk datang ke Pengadilan Agama Bantul, walaupun tidak cepat karena butuh waktu berminggu-minggu namun tetap saja masyarakat merasa dilayani dengan adil.

Menurut peneliti Hakim memang dituntut untuk menerapkan asas ini namun apabila tidak selalu harus menerapkannya karena ditakutkan akan tergesa-gesa untuk memutuskan suatu perkara.

Menurut peneliti asas sederhana ini akan cocok diterapkan apabila perkara yang ditangani hanya dikhususkan untuk perkara permohonan seperti yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2015 yakni tentang pelayanan terpadu dalam rangka akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran dimana dalam satu gedung ada instansi-

¹¹¹ Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty. Hlm 36.

instansi lain yang ikut sertadalam sidang keliling ini sehingga untuk menyelesaikan permohonan seperti untuk penerbitan buku nikah tidak perlu beberapa tempat untuk mengurusnya. Seperti yang dikatakan oleh Sudikno Mertokusumo adanya layanan *one stop service* (penyelesaian sengketa cukup diselesaikan melalui satu lembaga peradilan).

e. Asas Cepat

Asas Cepat tidak berbeda jauh dengan Asas sederhana yang mana menurut Sudikno Mertokusumo kata cepat menunjuk kepada jalannya peradilan, terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka persidangan saja, tetapi juga penyelesaian berita acara pemeriksaan dipersidangan sampai dengan penandatanganan oleh Hakim dan pelaksanaannya.

Hasil beberapa wawancara asas cepat ini sama halnya dengan asas sederhana yang tidak semua perkara bisa disama ratakan antara permohonan yang prosesnya dapat dilaksanakan dengan mudah dibandingkan dengan gugatan yang harus melalui banyak rangkaian pemeriksaan.

Ketua Pengadilan Agama Bantul menjelaskan tidak adanya pembatasan perkara hanya pada permohonan dikarenakan berpedoman pada Sidang Keliling sebelumnya yang mayoritas pendaftaran perkaranya adalah pendaftaran gugatan cerai baik cerai gugat atau cerai

talak, sedangkan pemohonannya hanya sedikit. Dan hasil koordinasi dengan Kecamatan setempat yang menginginkan semua perkara dapat diterima tanpa terkecuali karena kebutuhan masyarakat.

Menurut peneliti dengan tidak adanya pembatasan macam perkara akan sulit untuk menerapkan asas cepat ini namun apabila disandingkan dengan permintaan masyarakat yang tidak sesuai dengan apa yang berikan oleh Pengadilan Agama Bantul apabila ada pembatasanpun menjadi tidak akan berguna bagi masyarakat. Namun pelaksanaan Sidang Keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bantul sangat membantu karena saat ada bukti yang belum cukup dapat langsung diambil ke rumah mereka untuk memenuhi bukti dan sidang tidak perlu ditunda untuk agenda berikutnya.

f. Biaya Ringan

Penjelasan Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan keHakiman biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Biaya ringan dalam beracara di Pengadilan maksudnya agar terpikul atau dijangkau oleh rakyat. Biaya yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada Pengadilan.¹¹²

Wawancara dengan salah satu masyarakat dalam Sidang Keliling ini menjelaskan bahwa Sidang Keliling sangat memberikan kemudahan untuk masyarakatnya dan membantu masyarakatnya untuk dalam hal biaya.

¹¹²*Ibid.*

Walaupun harus mendaftarkan dan mengambil keputusan tetap di Kantor Pengadilan Agama namun dengan datang nya para staff Pengadilan Agama Bantul dapat menurangi pengeluaran.

Dari paparan salah satu masyarakat adanya asas biaya ringan ini sudah terpenuhi karena sangat membantu apalagi dalam biaya, karena dengan pelaksanaan Sidang Keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bantul membuat jarak masyarakat yang ingin berperkara tidak jauh untuk ditempuh karena Sidang Keliling Pengadilan Agama Bantul dipusatkan di Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul yang mencakup beberapa desa seperti Desa Dlingo, Desa Jatimulyo, Desa Mangunan, Desa Muntuk, Desa Temuwuh, Desa Terong. Dan banyaknya proses pemeriksaan dalam perkara perceraian semisal yang membutuhkan beberapa kali harus datang ke Pengadilan dengan membawa minimal dua saksi akan sangat memberatkan masyarakat untuk dalam ekonomi. Walaupun masyarakat tetap harus membayar panjar untuk biaya pemanggilan yang akan dilakukan oleh Jurusita dan untuk pendaftaran serta pengambilan keputusan harus tetap ke Pengadilan Agama Bantul.

Namun dari Pengadilan Agama sendiri tidak dapat menerapkan asas biaya ringan ini karena menurut penjasann seketaris yang mengurus anggaran Sidang Keliling ini, anggaran dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk pelaksanaan Sidang Keliling ini sangatlah terbatas sehingga harus ditutup oleh Pengadilan Agama Bantul yang disebabkan perencanaan anggaran tidak sesuai dengan yang berikan oleh DIPA. Ini

tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No 10 Tahun 2014 pasal 20 ayat (1) :

“Biaya penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan dibebankan kepada anggaran satuan Pengadilan dan terdiri dari :

- a. Biaya penyelenggaraan persidangan jika diperlukan*
- b. Biaya perlengkapan sidang jika diperlukan; dan*
- c. Biaya perjalanan dinas Hakim, panitera dan petugas lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2).”*

Dari penjelasan-penjelasan diatas menurut peneliti penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini belumlah optimal dikarenakan beberapa hal seperti tidak adanya pembatasan perkara yang diajukan dalam Sidang Keliling Pengadilan Agama Bantul karena beberapa perkara yang membutuhkan proses pemeriksaan yang teliti hingga membutuhkan waktu yang cukup lama namun asas sederhana dan cepat ini tetap diterapkan sebisa mungkin oleh Pengadilan Agama Bantul seperti pada perkara permohonan yang memang tidak membutuhkan waktu yang lama untuk pemeriksaanya.

Untuk asas biaya ringan sangat membantu masyarakat dengan tidak harus bolak-balik ke Pengadilan Agama Bantul dengan proses pemeriksaan yang panjang dan ditambah dengan beban biaya saksi. Namun tidak bagi Pengadilan Agama Bantul karena anggaran dana yang tidak mencukupi untuk pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Bantul hingga membuat Pengadilan Agama Bantul harus menutupi kekurangannya dengan uang Pengadilan Agama Bantul.

Namun menurut penulis pelaksanaan sidang keliling ini harusnya difokuskan untuk daerah luar Jawa yang daerah lebih sulit dijangkau seperti perbatasan Kalimantan dengan Malaysia yang jalannya masih sangat sulit dilewati atau di Sulawesi yang daerahnya sulit dijangkau, dibandingkan daerah Jawa yang masih memiliki jalan yang mulus walaupun di desa, pemfokusan dari Mahkamah Agung untuk daerah yang benar-benar membutuhkan ini agar asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini dapat teroptimaslisasi serta dapat memenuhi asas keadilan juga untuk masyarakat yang jauh dari Pengadilan Agama.

4. Hambatan dan Solusi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Bantul

Respon yang baik dari masyarakat seperti yang dijelaskan oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul bahwa kerjasama atau koordinasi dengan pejabat setempat kami pendapat respon yang sangat baik dari mereka serta masyarakat dan mereka malah meminta lebih sering untuk melaksanakan Sidang Keliling ini karena sangat membantu masyarakat.¹¹³ Serta ditambah dengan keterangan Jurusita yang mengantarkan panggilan sidang dengan pemaparan respon masyarakat positif.¹¹⁴ Namun dibalik respon positif oleh masyarakat dan pejabat setempat masih ada beberapa hambatan baik itu dari Pengadilan Agama Bantul, Kecamatan Dlingo, serta Masyarakat.

¹¹³ Wawancara dengan Drs. Yusuf, S.H., M.S.I (Ketua Pengadilan Agama Bantul), tanggal 10 April 2017 di Pengadilan Agama Bantul.

¹¹⁴ Wawancara dengan Sumitro Jatiroso (Jurusita), tanggal 10 April 2017 di Pengadilan Agama Bantul.

a. Hambatan-hambatan Sidang Keliling

1) Pengadilan Agama Bantul

Menganalisis dari yang sudah dibahas dalam bab 3 bahwa adapun hambatan-hambatan yang dialami oleh Pengadilan Agama Bantul adalah:

- a) Pendaftaran perkara masyarakat tidak dapat dilakukan secara kolektif.
- b) Masyarakat tidak dapat mendaftarkan perkaranya ditempat pelaksanaan Sidang Keliling, karena Pengadilan Agama tidak dapat membawa staf lebih karena adanya terbatasnya dana dari DIPA.¹¹⁵
- c) Dana yang terbatas menjadi salah satu hambatan Pengadilan Agama, karena ketidak sesuaian antara rancangan dengan anggaran yang diberikan DIPA.
- d) Adanya pembayaran biaya panjar dari masyarakat secara pribadi.

Permasalahan *pertama*, yang disebabkan tidak bisanya pendaftaran secara kolektif disebabkan adanya keharusan mendaftarkan perkara secara personal karena dengan pendaftaran personal akan lebih akurat data yang diterima oleh petugas Pengadilan Agama Bantul.

¹¹⁵ Wawancara dengan Lasini,S.H (Panitera Pengganti) , tanggal 10 April 2017 di Pengadilan Agama Bantul.

Namun dengan adanya kedatangan secara personal menjadikan tidak berjalannya asas biaya ringan karena harus menempuh jarak yang jauh dari desa Dlingo ke Pengadilan Agama Bantul.

Permasalahankedua, tidak dapat menerima perkara secara langsung di tempat pelaksanaan Sidang Keliling yakni Desa Dlingo disebabkan oleh adanya anggaran yang terbatas hingga hanya menetapkan para staff yang berperan penting dalam proses pelaksanaan Sidang Keliling dan akan mempersulit dari pemberian nomer register perkara.

Permasalahanketiga, yang diakibatkan anggaran yang diminta atau dirincikan oleh Pengadilan Agama Bantul ini tidak sesuai dengan dana yang diberikan oleh DIPA yakni Rp. 10.710.000,- (sepuluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), sehingga Pengadilan Agama Bantul harus menutupi kekurangannya dengan memkai uang kas Pengadilan Agama Bantul, masyarakat terbantudengan tidak perlu jauh ke Pengadilan Agama Bantul dan menciptakan asas biaya ringan, namun bagi Pengadilan Agama Bantul memberatkan karena adanya keterlibatan uang kas pribadi kantor untuk menutupi kekurangan.

Permasalahankeempat, yang disebabkan masih adanya penggunaan uang pribadi masyarakat untuk membayar panjar, karena tidak ada peraturan yang menyebutkan bahwa ada anggaran untuk

biaya panjar oleh DIPA seperti pada Peraturan Mahkamah Agung No 10 Tahun 2014 pasal 20 ayat (1) :

“Biaya penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan dibebankan kepada anggaran satuan Pengadilan dan terdiri dari :

- a. Biaya penyelenggaraan persidangan jika diperlukan*
- b. Biaya perlengkapan sidang jika diperlukan; dan*
- c. Biaya perjalanan dinas Hakim, panitera dan petugas lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2).*

Namun apabila ada masyarakat yang tidak mampu tetap akan dapat mengajukan perkara secara prodeo seperti ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No 10 Tahun 2014 pasal 7, dengan mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM), surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti kartu keluarga miskin (KKM), kartu Jaminan kesehatan masyarakat (JAMKESMAS), kartu beras miskin (RASKIN), kartu program keluarga harapan (PKH), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

2) Kecamatan Dlingo

Hambatan tidak hanya dimiliki oleh Pengadilan Agama, Kecamatan Dlingo ini juga memiliki beberapa hambatan, yakni:

- a) Penentuan tempat pelaksanaan Sidang Keliling, karena banyaknya desa yang ada di Kecamatan Dlingo.

- b) Terbatasnya dana dari Kecamatan Dlingo untuk ikut mendanai pelaksanaan sidang keliling.
- c) Pengawasan yang belum optimal, salah satunya pengawasan dalam bentuk administrasi pendaftaran perkara.¹¹⁶

Permasalahan *pertama*, karena Kecamatan Dlingo terbagi dengan beberapa desa maka Kecamatan dan Pengadilan tidak bisa melaksanakan Sidang Keliling untuk disetiap balai desa karena akan memakan waktu dan dana.

Permasalahan *kedua*, dana menjadi hambatan Kecamatan Dlingo karena anggaran desa terbatas dan tidak ada anggaran khusus untuk Sidang Keliling hingga Kecamatan Dlingo tidak bisa ikut serta membantu untuk biaya personal masyarakat untuk membayar perkara.

Dan adanya hambatan *ketiga*, pengawasan kepada masyarakat yang kurang ini menjadi salah satu hambatan karena terbatasnya staff dan adanya kesibukan staff Kecamatan Dlingo hingga tidak bisa selalu mengawal masyarakat.

3) *Masyarakat*

Masyarakat mendapatkan hambatan-hambatan sebagai berikut:

- a) Mendaftarkan perkara dengan datang langsung ke Pengadilan Agama hingga membutuhkan waktu dan biaya.
- c) Pendaftaran yang tidak bisa secara kolektif.

¹¹⁶ Wawancara dengan Suprpti,A.Md (Seksi Pelayanan Kecamatan Dlingo) , tanggal 25 November 2016 di Kantor Kecamatan Dlingo.

- d) Kurangnya pengetahuan mengenai persyaratan pendaftaran perkara di Pengadilan Agama.¹¹⁷

Pendaftaran secara langsung menjadi Permasalahan *pertama*, dengan adanya pendaftaran yang harus langsung ke Pengadilan masyarakat merasa jauh untuk hanya sekedar mendaftar dan belum lagi dengan adanya persyaratan yang kurang hingga mereka harus bolak-balik ke Pengadilan Agama Bantul.

Pendaftaran kolektif Permasalahan *kedua*, diinginkan masyarakat agar tidak perlu jauh-jauh untuk datang ke Pengadilan hingga bisa diwakilkan oleh satu orang karena jarak yang jauh. Namun apabila pendaftaran secara kolektif maka ditakutkan ada ketidak sesuaian saat mendaftarkan perkara hingga apabila yang mendapat berbeda dengan disurat gugatan akan sulit untuk memperbaiki kesalahan saat ada di Pengadilan Agama.

Permasalahan *ketiga*, adanya keluhan masyarakat yang tidak mengetahui informasi yang akurat untuk persyaratan pendaftaran perkara hingga saat mereka sudah di Pengadilan Agama dan ada yang kurang mereka harus datang lagi untuk melengkapi kekurangan nya.

¹¹⁷ Wawancara dengan Prihanto (masyarakat yang ikut serta dalam Sidang Keliling), tanggal 25 November 2016 di Kantor Kecamatan Dlingo.

b. Solusi–solusi Hambatan Sidang Keliling

Hambatan-hambatan yang didapatkan oleh Pengadilan Agama, Kecamatan Dlingo dan masyarakat terdapat beberapa solusi yang belum bisa ditemukan seperti penjelasan sebelumnya yakni:

1) Pengadilan Agama Bantul

Adapun penjelasan dari Ketua Pengadilan Agama Bantul menjelaskan masih banyak yang belum dapat solusi karena terbatasnya kemampuan dari Pengadilan Agama Bantul, adapun penjelasan tersebut sebagai berikut:

- a) Pengadilan Agama Bantul belum dapat mengatasi pendaftaran yang mengharuskan datang ke Pengadilan dan secara kolektif, sebab untuk mengurangi kesalahan dalam penerimaan perkara.
- b) Adanya anggaran yang lebih untuk Sidang Keliling kami dapat mengikutsertakan staff lebih sehingga masyarakat dapat mendaftarkan secara langsung apabila tidak dapat ke Pengadilan Agama
- c) Penggunaan uang dari Pengadilan Agama untuk menutupi kekurangan anggaran yang diberikan DIPA.
- d) Pendaftaran Perkara secara Prodeo untuk masyarakat yang tidak mampu membayar panjar.

Menurut Peneliti untuk solusi *pertama*, Pengadilan Agama dapat melakukan kajian lapangan ke Pengadilan Agama lain yang

dapat melakukan pendaftaran secara kolektif seperti contohnya Pengadilan Agama Wonosari.

Solusi *kedua*, pendaftaran yang bisa dilakukan secara langsung ini dapat di alternatifkan seperti dalam Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor : 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling di Peradilan Agama, dengan cara Petugas penerima pendaftaran perkara yang berada di lokasi Sidang Keliling, setiap menerima perkara baru harus melaporkan adanya pendaftaran perkara baru ke kantor Pengadilan yang bersangkutan melalui email atau media komunikasi lainnya untuk mendapat nomor perkara dan diproses ke dalam register perkara. Petugas meja I setelah menerima laporan adanya pendaftaran perkara baru dari petugas yang berada di tempat Sidang Keliling, segera memproses sesuai prosedur penerimaan perkara dan memberitahukan kepada petugas di lokasi Sidang Keliling mengenai nomor pendaftaran perkara. Pendaftaran perkara dapat juga dilakukan secara on line dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pembayaran panjar biaya perkara harus dilakukan melalui bank atau dapat juga ditransfer melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau internet banking, apabila di daerah sekitar lokasi Sidang Keliling tidak terdapat bank, maka pembayaran dapat dilakukan kepada petugas Pengadilan yang berada di lokasi Sidang Keliling. Pembayaran panjar biaya perkara dengan menggunakan bukti transfer melalui ATM atau

internet banking, pendaftarannya dilakukan setelah diverifikasi oleh kasir atau petugas yang ditunjuk.

Permasalahanketiga, penggunaan anggaran yang melibatkan adanya uang kas Pengadilan Agama yang dikarenakan anggaran dari DIPA yang terbatas dapat mejadi solusi untuk Pengadilan Agama Bantul walaupun tidak efektif bagi Pengadilan Agama Bantul atau Pengadilan Agama dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk dapat membantu dalam Sidang Keliling, bantuan ini diperbolehkan dalam Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor: 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling di Peradilan Agama dalam Bab II Biaya Pelaksanaan Sidang Keliling Angka 2 Non DIPA Mahkamah Agung. Dikatakan bahwa Sidang Keliling dapat dibiayai menerima oleh Pemda atau institusi lain yang bukan pribadi, namun pembiayaan oleh pihak lain bersifat tidak mengikat dan tidak mengurangi independensi Pengadilan sebagai lembaga yudisial dan independensi Hakim dalam memutus perkara.

Solusi untuk Permasalahankeempat, biaya panjar menurut peneliti Pengadilan Agama Bantul dapat mencontoh dengan Pengadilan Agama Wonosari yang biaya panjarnya dibebaskan kepada Pemerintah Daerah karena adanya koordinasi antara Pengadilan Agama Wonosari, Kecamatan setempat dan Pemerintah Daerah setempat.

2) Kecamatan Dlingo

Adapun solusi yang ditawarkan oleh pihak Kecamatan Dlingo yakni:

- a) Pelaksanaan Sidang Keliling dipusatkan di kantor Kecamatan Dlingo.
- b) Belum ada solusi untuk anggaran yang terbatas dari Kecamatan Dlingo.
- c) Penyuluhan dan persiapan lebih sebelum pelaksanaan Sidang Keliling dilaksanakan.¹¹⁸

Menurut Peneliti solusi *pertama*, penempatan sidang dikeliling yang terpusat di Kantor Kecamatan Dlingo sudah benar hingga tidak ada desa yang merasa diutamakan karena masih dalam satu kecamatan dan lingkup untuk Sidang Kelilingpun tidak luas antar Kecamatan.

Untuk solusi Permasalahankedua, peneliti memberikan solusi untuk Kecamatan Dlingo berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat untuk dapat ikut serta membantu pelaksanaan Sidang Keliling di Kecamatan Dlingo hingga masyarakat akan ikut terbantu dari bebas nya biaya panjar misalnya.

Permasalahanketiga, dapat ditanggulangi dengan adanya pembagian tugas kepada pihak Kepala desa dan dilakukan dengan persiapan yang matang dengan memberikan penyuluhan jauh-jauh

¹¹⁸ Wawancara dengan Suprapti,A.Md (Seksi Pelayanan Kecamatan Dlingo) , tanggal 25 November 2016 di Kantor Kecamatan Dlingo.

hari dari pelaksanaan Sidang Keliling, seperti memberikan penyuluhan apa saja yang perlu disiapkan.

3) Masyarakat

Solusi yang belum dapat diselesaikan masyarakat menjadi hambatan masyarakat, namun beberapa dapat diatasi seperti:

- a) Belum ada solusi untuk pendaftaran ke Pengadilan dari masyarakat sehingga masyarakat hanya diam.
- b) Belum ada solusi untuk pendaftaran kolektif ke Pengadilan.
- c) Mencari informasi lebih dan mengikuti penyuluhan dari Kecamatan.¹¹⁹

Untuk solusi *pertama*, masyarakat dapat membuat usulan kepada Pengadilan Agama Bantul serta Kecamatan Dlingo apa yang sekiranya masyarakat butuhkan.

Peemmasalahan *kedua*, dengan adanya usulan maka Pengadilan Agama Bantul serta Kecamatan Dlingo maka diharapkan akan ada perubahan yang optimal untuk pelaksanaan Sidang Keliling selanjutnya.

Permasalahanketiga, dengan aktif ikut serta dalam penyuluhan yang diberikan oleh Kecamatan atau Kepala Desa maka dapat memberikan pengetahuan untuk pendaftaran perkara hingga masyarakat tidak ada kebingungan

¹¹⁹ Wawancara dengan dengan Prihanto (masyarakat yang ikut serta dalam Sidang Keliling), tanggal 25 November 2016 di Kantor Kecamatan Dlingo.